



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG	:	EKSEKUTIF
LEMBAGA	:	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
UNIT KERJA	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI		
1.	Nama	: RINALDI
2.	Jabatan	: KEPALA BADAN
3.	NHK	: 185776
II. DATA HARTA		
A. TANAH DAN BANGUNAN		
		Rp. 1.339.500.000
1.	Tanah Seluas 300 m2 di NATUNA, HASIL SENDIRI	Rp. 67.000.000
2.	Tanah Seluas 300 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI	Rp. 67.000.000
3.	Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/138 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI	Rp. 927.500.000
4.	Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI	Rp. 215.000.000
5.	Tanah Seluas 88 m2 di KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI	Rp. 53.000.000
6.	Tanah Seluas 92 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI	Rp. 10.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		
		Rp. 190.300.000
1.	MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp. 6.500.000
2.	MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp. 3.800.000
3.	MOTOR, YAMAHA YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp. 16.000.000
4.	MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp. 140.000.000
5.	MOTOR, KAWASAKI NINJA RR 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp. 24.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		
		Rp. 64.700.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	169.314.046
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.763.814.046
III. HUTANG	Rp.	342.592.737
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.421.221.309

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.